



Analisis *Fraud Diamond Theory* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Mukhlas Adi Putra, Nugroho Tulus Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Corresponding author: mukhlas@stiesemarang.ac.id, nugroho_tulus@stiesemarang.ac.id

Riwayat Artikel: Dikirim; Diterima; Diterbitkan

Abstrak

Artikel ini menjelaskan *fraud diamond theory* sebagai alat pendeteksian tindak terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Proxy yang digunakan dalam *fraud diamond theory* adalah *transparency* pada variabel *pressure*, *quality of external audit* pada variabel *opportunity*, *ineffective monitoring* pada variabel *rationalization*, dan *positioning* pada variabel *capability*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Guntur. Penelitian ini menemukan bahwa *pressure* dan *opportunity* tidak berpengaruh signifikan pada pendeteksian fraud. Sedangkan *rationalization* dan *capability* berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud* pada penggunaan dana desa.

Kata kunci: *Fraud diamond theory*, dana desa.

Abstract

This article describes diamond theory fraud as a means of detecting acts of fraud in the use of village funds in the Guntur District, Demak Regency. Proxies used in diamond theory fraud are transparency on the pressure variable, quality of external audit on the opportunity variable, ineffective monitoring on the rationalization variable, and positioning on the capability variable. The population in this study are all village officials in Guntur District. This study found that pressure and opportunity had no significant effect on fraud detection. While rationalization and capability significantly influence fraud detection on the use of village funds.

Keywords: *Fraud diamond theory, village fund.*

PENDAHULUAN

Dana Desa dicetuskan era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan pada pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dan Nota Keuangannya di depan Anggota DPR (DetikFinance, 2014). Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sekaligus pelaksana RAPBN 2015 dengan alokasi dana Desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pemerintah merasa dana Desa mempunyai manfaat yang cukup besar, maka pada tahun 2016 dana Desa ditingkatkan menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp. 800 juta (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa

terbangunnya lebih dari 95,5 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar Desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Selain itu, dana Desa juga telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun



2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan dana Desa yang baik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Alokasi dana Desa di kecamatan Guntur Kabupaten Demak tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2016 sebesar Rp. 7.600.759.000,00. Adapun pembagian masing-masing Desa di Kecamatan Guntur yang terdiri dari 20 desa sebagai berikut.

Tabel 1
Alokasi Dana Desa Kecamatan Guntur

No	Kode	Desa	Nominal
1	33.21.03.2001	Blerong	Rp. 440.107.000,00
2	33.21.03.2002	Banjarejo	Rp. 355.276.000,00
3	33.21.03.2003	Wonorejo	Rp. 391.603.000,00
4	33.21.03.2004	Sarirejo	Rp. 358.019.000,00
5	33.21.03.2005	Pamongan	Rp. 357.385.000,00
6	33.21.03.2006	Tlogoweru	Rp. 359.808.000,00
7	33.21.03.2007	Bogosari	Rp. 508.755.000,00
8	33.21.03.2008	Sukorejo	Rp. 368.053.000,00
9	33.21.03.2009	Sidokumpul	Rp. 398.919.000,00
10	33.21.03.2010	Gaji	Rp. 370.039.000,00
11	33.21.03.2011	Krandon	Rp. 355.012.000,00
12	33.21.03.2012	Tangkis	Rp. 356.788.000,00
13	33.21.03.2013	Temuroso	Rp. 549.926.000,00
14	33.21.03.2014	Bakalrejo	Rp. 488.436.000,00
15	33.21.03.2015	Guntur	Rp. 439.457.000,00
16	33.21.03.2016	Bumiharjo	Rp. 427.348.000,00
17	33.21.03.2017	Tlogorejo	Rp. 352.823.000,00
18	33.21.03.2018	Trimulyo	Rp. 416.745.000,00
19	33.21.03.2019	Sidoharjo	Rp. 377.474.000,00
20	33.21.03.2020	Turitempel	Rp. 351.642.000,00
Jumlah			Rp. 8.023.615.000,00

Sumber : Perbup Demak Nomor 5 tahun 2016.

Tindak kecurangan bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Salah satu *red flag* dalam *fraud* adalah *abused of power*. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang merupakan titik awal terjadinya tindak kecurangan. Kepala desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa mempunyai hak penuh atas penggunaan anggaran desa. Sehingga rawan terjadinya penyelewengan dana Desa kalau system pengendaliannya, pengawasan, dan audit tidak berjalan dengan baik.

Fraud Diamond Theory pertama kali dipresentasikan oleh Wolfe dan Hermanson dalam jurnal CPA bulan Desember 2004. Versi ini dipandang sebagai versi perluasan *Fraud Triangel Theory*. Dalam teori ini ditambahkan sebuah elemen baru yang menggenapi tiga komponen dari *Fraud Triangle Theory* yang bernama *Capability* (kemampuan). Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa meskipun tekanan yang dirasakan mungkin bersamaan dengan *Opportunity* dan *Rationalization*, tidak mungkin akan terjadi kecurangan



jika elemen keempat (kemampuan) tidak ada. Dengan kata lain, pelaku potensial harus memiliki ketrampilan dan kemampuan melakukan kecurangan (Abdullahi & Mansor, 2015).

1. Perumusan Masalah

Berbagai masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah variabel *Pressure* pada proksi *Transparency* berpengaruh pada pendeteksian fraud pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ?
- 2) Apakah variabel *Opportunity* pada proksi *Quality of External Audit* berpengaruh pada pendeteksian Fraud pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ?
- 3) Apakah variabel *Rationalization* pada proksi *Ineffective Monitoring* berpengaruh pada pendeteksian Fraud pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ?
- 4) Apakah variabel *Capability* pada proksi *Positioning* berpengaruh pada pendeteksian Fraud pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendapatkan bukti bahwa variabel *Pressure* pada proksi *Transparency* berpengaruh pada pendeteksian *fraud* pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
2. Untuk mendapatkan bukti bahwa variabel *Opportunity* pada proksi *Quality of External Audit* berpengaruh pada pendeteksian *Fraud* pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
3. Untuk mendapatkan bukti bahwa variabel *Rationalization* pada proksi *Ineffective Monitoring* berpengaruh pada pendeteksian *Fraud* pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
4. Untuk mendapatkan bukti bahwa variabel *Capability* pada proksi *Positioning* berpengaruh pada pendeteksian *Fraud* pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

METODE

Populasi penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang ada di kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Pertimbangan dalam memilih populasi seluruh aparat desa yang ada di kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah untuk menganalisis pengaruh teori *fraud diamond* dalam pengelolaan Dana Desa yang ada di Kecamatan Guntur.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan *cuota sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Responden merupakan aparat desa
- b. Masing-masing desa disebar maksimal 10 kuesioner.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode survey yaitu melalui kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 153 kuesioner dari 200 kuesioner yang disebar.

Pendeteksian fraud diukur dengan menggunakan indikator pertanyaan seperti: Salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja adalah tindakan wajar; Penggantian dokumen merupakan hal yang wajar; Rekayasa pelaporan adalah hal yang wajar, karena di desa lain juga sama; Saya akan melakukan kompromi terhadap auditor jika terdeteksi kecurangan; Pertanggungjawaban dana desa merupakan amanah rakyat.

Variabel *pressure* dengan *proxy transparency* disusun pertanyaan sebagai berikut: Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi; Informasi yang



diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran; Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran; Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis; Musreimbang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran; Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu; Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan/ suara rakyat; Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu; Pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh publik.

Pertanyaan variabel *opportunity* dengan *proxy quality of external audit* adalah sebagai berikut: Saya lebih suka auditor yang memeriksa laporan keuangan dengan sampling; Saya lebih suka auditor yang memeriksa laporan keuangan secara detail; Auditor independen ditentukan oleh desa / kelurahan; Sambutan yang baik dalam menjamu auditor sangat diperlukan (termasuk uang saku dan buah tangan); Jika auditor diketahui kurang teliti dalam mengaudit, maka saya akan merekayasa laporan keuangan; Untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, saya akan melakukan segala cara (termasuk melobi auditornya).

Variabel *rationalization* pada *proxy ineffective monitoring* disusun pertanyaan sebagai berikut: Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran; Pengawasan anggaran dilakukan secara internal dan eksternal; Pimpinan atau atasan secara langsung dan rutin menilai kinerja bawahan pengguna anggaran; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif mengawasi mekanisme penggunaan anggaran; Mengambil keuntungan dari anggaran tidak apa apa, karena kita juga berperan dalam kegiatan tersebut; Kalau tidak ada pengawasan saya akan mengambil sedikit dari anggaran untuk keperluan pribadi; Revisi anggaran berdasarkan skala prioritas; Revisi anggaran berdasarkan kepentingan pribadi dan golongan.

Variabel terakhir yaitu *capability* pada *proxy positioning* disusun pertanyaan sebagai berikut: Saya akan melakukan manipulasi anggaran, jika saya mempunyai wewenang untuk melakukannya; Saya dapat melihat celah dalam penyusunan anggaran; Jika saya mempunyai wewenang dalam mempengaruhi hasil musrenbangdes, maka saya akan melakukannya; Saya mempunyai strategi khusus dalam melakukan kecurangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan reliabilitas suatu instrumen sangat mutlak dibutuhkan dalam menentukan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Dengan uji *confirmation factor analysis (CFA)* dengan *factor loading* yang dipakai 0,4. Apabila hasil *factor loading* menunjukkan nilai lebih dari 0,4 maka butir pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali, 2016). Kuesioner dapat dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha* >0,60 (Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas terdapat beberapa item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid. Pertanyaan yang tidak valid tersebut antara lain pada variabel *pressure* yaitu; laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu. Pada variabel *rationalization* yaitu; revisi anggaran berdasarkan kepentingan pribadi dan golongan. Pada variabel pendeteksian *fraud* yaitu; rekayasa pelaporan adalah hal yang wajar, karena di desa lain juga sama; saya akan melakukan kompromi terhadap auditor jika terdeteksi kecurangan. Pertanyaan yang tidak valid tersebut dikeluarkan dari analisis. Kemudian dilakukan analisis validitas reliabilitas masing-masing variabel. Berikut adalah tabel validitas setelah indikator yang tidak valid dikeluarkan:



Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	KMO	Kisaran Factor Loading	Rule of thumb	Keterangan
<i>Pressure</i> pada proksi <i>Transparency</i>	0,887	0,480 – 0,633	0,4	Valid
<i>Opportunity</i> pada proksi <i>Quality of External Audit</i>	0,566	0,547 – 0,661	0,4	Valid
<i>Rationalization</i> pada proksi <i>Ineffective Monitoring</i>	0,550	0,587 – 0,788	0,4	Valid
<i>Capability</i> pada proksi <i>Positioning</i>	0,603	0,570 – 0,913	0,4	Valid
Pendeteksian <i>Fraud</i>	0,465	0,671 – 0,899	0,4	Valid

Sumber : data primer diolah, 2019.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
<i>Pressure</i> pada proksi <i>Transparency</i>	0,876	Reliable
<i>Opportunity</i> pada proksi <i>Quality of External Audit</i>	0,746	Reliable
<i>Rationalization</i> pada proksi <i>Ineffective Monitoring</i>	0,707	Reliable
<i>Capability</i> pada proksi <i>Positioning</i>	0,657	Reliable
Pendeteksian <i>Fraud</i>	0,611	Reliable

Sumber : data primer diolah, 2019.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik regresi linier berganda yang diolah menggunakan program *SPSS Versi 21*. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
	(Constant)	7,941	2,641				3,007	,003
1	Proxy Transparency	,006	,056	,010	,115	,909	,596	1,678
	Proxy Quality of External Audit	-,019	,113	-,014	-,164	,870	,594	1,685
	Proxy in Effective Monitoring	,111	,056	,136	1,992	,048	,932	1,073
	Proxy Positioning	,531	,067	,549	7,943	,000	,911	1,097

a. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud

Sumber : data primer diolah, 2019.

Berdasarkan pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai t hitung variabel *pressure* pada *proxy transparency* sebesar 0,115 dengan nilai signifikansi sebesar $0,909 < 0,05$. Dapat dikatakan bahwa variabel *pressure* pada *proxy transparency* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud* pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis ke 1 ditolak.



Pengujian hipotesis 2 diketahui bahwa nilai t hitung variabel *opportunity* pada *proxy quality of external audit* sebesar -0,164 dengan nilai signifikansi sebesar $0,870 < 0,05$. Dapat dikatakan bahwa variabel *opportunity* pada *proxy quality of external audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud* pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis ke 2 ditolak.

Pengujian hipotesis 3 diketahui bahwa nilai t hitung variabel *rationalization* pada *proxy ineffective monitoring* sebesar 1,992 dengan nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$. Dapat dikatakan bahwa variabel *rationalization* pada *proxy ineffective monitoring* berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendeteksian *fraud* pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis ke 3 berhasil didukung.

Pengujian hipotesis 4 diketahui bahwa nilai t hitung variabel *capability* pada *proxy positioning* sebesar 7,943 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat dikatakan bahwa variabel *capability* pada *proxy positioning* berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendeteksian *fraud* pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis ke 4 berhasil didukung.

Persamaan regresi yang di dapat adalah sebagai berikut :

$$Y = 7,941 + 0,006X_1 - 0,019X_2 + 0,111X_3 + 0,531X_4 + e$$

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bisa dilihat pada tabel koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,596 ^a	,355	,338	2,032

a. Predictors: (Constant), Proxy Positioning, Proxy Transparency, Proxy in Effective Monitoring, Proxy Quality of External Audit

b. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud

Sumber : data primer diolah, 2019.

Pada tabel diatas diketahui R^2 sebesar 0,355 artinya besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,355 atau 35,5%.

Dari hasil serangkaian uji diatas diketahui bahwa variabel *pressure* yang diprosikan dengan *transparency* menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa variabel *pressure* pada *proxy transparency* tidak membantu pendeteksian *fraud*. Apabila transparansi penggunaan dana desa meningkat belum tentu meningkatkan pendeteksian *fraud*. Hasil yang tidak signifikan ini dikarenakan transparansi penggunaan anggaran dana desa akan membuat sulitnya oknum pejabat desa yang menyalahgunakan anggaran desa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Salle (2016) yang menjelaskan bahwa transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka oleh pemerintah daerah kepada prinsipal (warga masyarakat). Alasan responden beranggapan pertanyaan yang dibuat merupakan pertanyaan yang negatif (membuka aib), sehingga sulit menjawab dengan transparan dan sebenarnya. Sudut pandang dalam penelitian ini adalah pelaku pengguna anggaran dana desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjadi responden adalah auditor akuntan.

Hasil pengujian variabel *opportunity* yang diprosikan dengan *quality of external audit* menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa variabel *opportunity*



pada *proxy quality of external audit* tidak membantu pendeteksian *fraud*. Hal ini tidak sejalan dengan temuan Suryanto, Indriyani, & Sofyani, (2017) dalam penelitiannya ditemukan bahwa pengalaman auditor dan tipe kepribadian memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Alasan mengenai tidak berpengaruhnya variabel *opportunity* pada *proxy quality of external audit* karena sudut pandang penelitian. Jika dalam penelitian ini respondennya adalah pengguna anggaran dana desa, sedangkan penelitian Suryanto dkk, meneliti auditor eksternalnya. Suryanto et al., (2017) menjelaskan semakin berpengalaman seorang auditor maka akan semakin mampu dalam mendeteksi kecurangan. Dalam penelitian ini adalah pihak pengguna anggaran yang beranggapan jika semakin baik kualitas auditor eksternalnya maka akan menyulitkan oknum pengguna dana desa melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *rationalization* pada *proxy ineffective monitoring* memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. *Ineffective monitoring* merupakan pemantauan yang tidak efektif dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah setingkat di atasnya, dan masyarakat dalam memonitoring penggunaan dana desa. Penelitian ini menunjukkan semakin tidak efektif dalam memonitoring penggunaan dana desa menjadikan semakin tinggi pula terjadinya tindakan kecurangan dalam penggunaan anggaran dana desa. Menurut Humas Mranggen, (2018) menjelaskan bahwa Semua pihak yang terkait dalam penggunaan dana desa harus dilibatkan. Kapolres Demak AKBP Maesa Soegriwo, SIK melalui Kapolsek Mranggen AKP Son Haji, SH mengatakan Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) dalam penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan. Monitoring yang maksimal dapat mengawal penggunaan dana desa. Imbasnya adalah masyarakat semakin percaya terhadap pemerintah tentang penggunaan dana desa. Hal ini secara otomatis menepis anggapan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa tentang penggunaan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis ke empat menunjukkan variabel *capability* pada *proxy positioning* memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Zahara (2017) menjelaskan bahwa hal yang paling mengidentikkan dengan perilaku korupsi bagi masyarakat luas adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Posisi atau jabatan seseorang dapat menjadikannya berperilaku menyimpang. Mereka yakin masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/ pekerjaan yang mereka miliki saat ini (Zahara, 2017). Akan tetapi, semakin tinggi jabatan akan dapat dengan mudah memantau dan mendeteksi tindak terjadinya kecurangan yang dilakukan bawahan. Dalam kaitannya penggunaan dana desa, kepala desa merupakan sosok yang sentral dalam pengelolaan dana desa tersebut. Kemampuan *leadership* yang baik seorang kepala desa menjadikan rencana pembangunan desa melalui musrenbangdes yang dilaksanakan setahun sekali pada masa akhir tahun akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *diamond fraud theory* yang terdiri dari *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*. Keempat variabel tersebut diproksikan masing-masing pada *transparency*, *quality of external audit*, *ineffective monitoring*, dan *positioning*. *Diamond fraud theory* tersebut mempengaruhi pendeteksian *fraud* pada penggunaan dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Penelitian ini menemukan bahwa *pressure* dengan *proxy transparency* dan variabel *opportunity* dengan *proxy quality of external audit* tidak berpengaruh secara signifikan



terhadap pendeteksian *fraud*. Artinya tidak ada pengaruhnya jika transparansi dan kualitas audit external meningkat terhadap pendeteksian terjadinya tindak kecurangan.

Sebaliknya, pada variabel *rationalization* dengan *proxy ineffective monitoring* dan variabel *capability* pada *proxy positioning* dinyatakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa monitoring yang tidak efektif dapat meningkatkan tindak terjadinya kecurangan (*fraud*). Posisi jabatan juga mempengaruhi pendeteksian *fraud*. Semakin baik dalam mengemban amanah jabatan tersebut semakin baik pula dalam kontrol pengendalian tindak terjadinya kecurangan (*fraud*).

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden yang berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya, dimana responden penelitian ini adalah pelaku pengguna anggaran dana desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya semua responden adalah auditor akuntan yang mengaudit laporan keuangan. Ada beberapa indikator pertanyaan dari beberapa variabel yang dinyatakan dalam uji tidak valid. Ada beberapa asumsi yang bisa dinyatakan dalam tidak validnya indikator tersebut, antara lain; sulitnya menyusun pertanyaan yang sesuai dengan posisi responden, karena literatur yang ada semua membahas responden yang berbeda; ketidakpahaman responden dalam memahami pertanyaan; ketiga hampir 80% pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan negatif yang menyulitkan responden menjawab dengan jujur sesuai dengan keadaan yang dialami.

Saran penelitian selanjutnya diharapkan membuat pertanyaan kuesioner yang bersifat positif, agar jawaban yang diperoleh sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Penelitian selanjutnya terkait dengan penggunaan dana desa dapat menggunakan pendekatan teori yang lain seperti *triangle fraud teori*, *pentagon fraud teori*, atau yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R. 'u, & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination. *South-Western Cengage Learning*, 696. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- DetikFinance. (2014). Di Masa SBY, Pemerintah Sediakan Dana Khusus untuk Desa. *Www.detik.com*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2721459/di-masa-sby-pemerintah-sediakan-dana-khusus-untuk-desa>
- Humas Mranggen. (2018). BhabinKamtibmas Ikut Serta Monitoring Proyek Pembangunan Infrastruktur Desa. Retrieved from <http://tribratanews.demak.jateng.polri.go.id/bhabinkamtibmas-ikut-serta-monitoring-proyek-pembangunan-infrastruktur-desa/>
- Jensen, M. C., & Smith, Jr., C. W. (2000). Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Applications of Agency Theory. *SSRN Electronic Journal*, (December 2000). <https://doi.org/10.2139/ssrn.173461>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nwoye, U. J., Ekésiobi, C., Obiorah, J., & Chidoziem, A. M. F. (2016). Inclusive Application of SAS No. 99 in the Effective Deterrence of Fraudulent Financial Reporting in Nigeria: Perception of Professional Accountants in Practice, Industries and Academics. *Journal of The Institute of Chartered Accountants of Nigeria*, 49(4), 42–48.



- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/>
- Salle, A. (2016). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1–19.
- Supriadin, J. (2017). Jokowi Sebut 900 Kades Tersangkut Penyalahgunaan Dana Desa. *www.liputan6.com*. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/3132088/jokowi-sebut-900-kades-tersangkut-penyalahgunaan-dana-desa>
- Suryanto, R., Indriyani, Y., & Sofyani, H. (2017). Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 102–118. <https://doi.org/10.18196/jai.18163>
- Tommie Singleton, Aaron Singleton, Jack Bologna, R. L. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (3rd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42. <https://doi.org/DOI:>
- Zahara, A. (2017). Pengaruh Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru).

